

Siaran Pers SPKS :



Penerapan Pungutan Dana Sawit Kembali Akan Menurunkan Harga Tandan Buah Sawit (TBS) Petani Sawit

Jakarta, 13 Juni 2019 – Petani kelapa sawit menilai pencabutan pungutan sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) terhadap Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang dikeluarkan oleh kementerian perekonomian sudah sejalan dengan permintaan petani sawit sebelum pencabutan ini dilakukan, Sekretaris jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) **Mansuetus Darto** menjelaskan pungutan yang dilakukan oleh BPDP-Sawit mengakibatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani turun. Pungutan ekspor sebesar US\$ 50 per ton tidak perlu dilakukan jika harga rata-rata CPO sekitar US\$ 500/Ton karena kondisi seperti ini akan mengakibatkan harga CPO lokal akan turun dimana kita tahu bersama kalau harga CPO lokal ini menjadi komponen dalam penentuan harga TBS ditingkat petani. dalam hitungan SPKS ada penurunan harga TBS sekitar Rp.100/Kg – Rp.300 pada setiap pungutan sawit oleh BPDP-Sawit dilakukan.

Pencabutan Pungutan Dana Sawit :

Pada tanggal 26 November 2018 pemerintah melalui **Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution** mencabut pungutan CPO oleh BPDP-Sawit dengan alasan harga CPO yang terus menurun hingga harga 410 USD/Ton pada bulan november 2018. Pencabutan dilakukan salah satunya untuk membantu harga di level petani tetap stabil. Pungutan akan diberlakukan kembali jika harga CPO sudah di level US\$ 550 /Ton seperti tabel dibawah ini :

No.	Keterangan	Pungutan sekarang (USD/Ton)	Pungutan jika harga < 500 USD/Ton	Pungutan jika harga di antara 500 USD/Ton s.d 549 USD/Ton	Pungutan jika harga > 549 USD/Ton
1	CPO	50	0	25	50
2	Turunan 1	30	0	10	30
3	Turunan 2	20	0	5	20

Paska pencabutan ini pemerintah di apresiasi dan didukung oleh stakeholders sawit di indonesia karena dinilai akan memberikan dampak pada harga sawit. diantaranya dari kalangan industri yang dinilai akan menaikkan harga CPO di tingkat internasional¹ dan petani sawit yang dinilai akan menaikkan harga TBS sawit ditingkat petani sawit.

¹ Pungutan Ekspor CPO Dinolkan, Industri Terima Kasih ke Jokowi
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181126190648-4-43775/pungutan-ekspor-cpo-dinolkan-industri-terima-kasih-ke-jokowi>

Pungutan Dana Sawit Menaikan Harga TBS Petani ?

Terhitung setelah pencabutan pungutan dana sawit diberlakukan harga CPO lokal dan TBS sawit petani diberbagai daerah mengalami kenaikan, dari data yang dikumpulkan oleh SPKS dengan mengambil 3 provinsi daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia terdiri dari 1 provinsi Kalimantan dan 2 provinsi Sumatera, tercatat ada perubahan harga CPO lokal antara Rp. 1000/Kg -Rp. 1.500/Kg CPO. Dengan perubahan sebagai berikut untuk Provinsi Sumatera utara Periode harga TBS 01 Desember 2018 s/d 12 Desember 2019 Harga rata – rata CPO : Rp. 5.822,56 naik menjadi Rp. 6.088,80/Kg pada periode Periode 12 Desember 2018 s/d 18 Desember 2018, sementara untuk Provinsi Riau Periode 21 November 2018 s/d 27 November 2018 dari Harga rata – rata CPO : Rp. 5.629,80/Kg menjadi Rp. 6.347,11/Kg pada Periode 26 Desember 2018 s/d 8 Januari 2019, untuk Provinsi Kalimantan Barat Periode 01 Desember 2018 S/D 18 Desember 2018 Harga rata – rata CPO Rp. 4.968,93/Kg menjadi Rp. 5.470,75/Kg Periode 18 Desember 2018 S/D Januari 2019. Kenaikan harga CPO lokal ini juga turut meningkatkan harga TBS pada 3 provinsi ini :

Tabel : Perkembangan harga TBS 3 provinsi sebelum pencabutan pungutan CPO dan sesudah pungutan CPO dicabut :

Umur Tanaman	Perkembangan Harga TBS di 3 Provinsi					
	Prov. Sumut Periode 01 Desember s/d 18 Desember 2018	Prov. Sumut Periode 12 Desember 2018 s/d 18 Desember 2018	Prov. Riau Periode 21 s/d 27 November 2018	Provi Riau Periode 26 Desember 2018 s/d 8 Januari 2019	Prov Kalbar Periode 01 Desember 2018 S/D 18 Desember 2018	Prov Kalbar Periode 18 Desember 2018 S/D Januari 2019
Umur 3 Tahun	Rp 970,73	Rp 1.018,19	Rp 898,05	Rp 1.060,56	Rp 777,77	Rp 854,96
Umur 4 Tahun	Rp 1.062,04	Rp 1.114,06	Rp 907,37	Rp 1.144,45	Rp 832,14	Rp 914,79
Umur 5 Tahun	Rp 1.122,33	Rp 1.177,57	Rp 1.057,96	Rp 1.246,11	Rp 889,57	Rp 977,98
Umur 6 Tahun	Rp 1.153,95	Rp 1.210,77	Rp 1.082,98	Rp 1.275,38	Rp 971,49	Rp 1.008,68
Umur 7 Tahun	Rp 1.165,16	Rp 1.222,45	Rp 1.125,03	Rp 1.324,95	Rp 950,71	Rp 1.045,19
Umur 8 Tahun	Rp 1.195,48	Rp 1.254,34	Rp 1.155,73	Rp 1.360,93	Rp 980,90	Rp 1.078,41
Umur 9 Tahun	Rp 1.218,69	Rp 1.278,62	Rp 1.182,14	Rp 1.391,53	Rp 997,54	Rp 1.096,73
Umur 10-20 Tahun	Rp 1.250,35	Rp 1.311,72	Rp 1.209,19	Rp 1.422,97	Rp 1.041,43	Rp 1.144,86
Umur 21-24 Tahun	Rp 1.247,58	Rp 1.308,85	Rp 1.159,20	Rp 1.298,38	Rp 1.022,82	Rp 1.119,13
Umur > 25 Tahun	Rp 1.138,49	Rp 1.194,78	Rp 1.075,72	Rp 1.268,33	Rp 927,47	Rp 1.019,38

Sumber : dinas perkebunan provinsi harga ketetapan harga TBS masing-masing provinsi

Pada tabel diatas dapat dilihat perkembangan harga TBS sebelum pungutan sawit dihentikan dan sesudah pungutan sawit dihentikan, ada kenaikan harga TBS sawit petani masing-masing provinsi sekitar Rp. 1.000/Kg – 1.200/Kg. pada Provinsi Sumatera utara Periode harga TBS tanggal 01 Desember 2018 s/d 12 Desember 2019 Harga TBS umur 3 tahun Rp. 970,73/Kg naik menjadi Rp. 1.018,19 pada periode Periode 12 Desember 2018 s/d 18 Desember 2018, begitupun untuk umur 25 tahun. Kenaikan harga TBS ini juga terjadi pada Provinsi Kalimantan Barat pada Periode 01 Desember 2018 S/D 18 Desember 2018 Harga TBS umur 10-20 tahun Rp. 1.041,43 naik menjadi Rp. 1.144,86/Kg pada Periode 18 Desember 2018 S/D Januari 2019.

Permintaan penghentian pungutan sawit dicabut

Terkait dengan adanya permintaan dari kalangan industri agar pungutan BPDP-Sawit kembali diberlakukan dengan alasan salah satunya ekspor yang sulit untuk bersaing bersaing², dianggap bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memperbaiki harga TBS di tingkat petani pasalnya harga CPO masih di bawah US\$ 550 /Ton selain itu pencabutan pungutan sawit pada november sudah menyelamatkan petani karena ada kenaikan harga TBS sekitar Rp. 100/Kg – Rp. 150/Kg sampai sekarang ini, kalau ini akan diberlakukan maka akan sangat memberatkan dan merugikan petani sawit, harga akan turun kembali.

SPKS merekomendasikan kepada pemerintah, jika pungutan diberlakukan kembali :

1. Pungutan sawit oleh BPDP-Sawit yang semula US\$ 50 per ton harus diturunkan menjadi 25 USD/Ton dengan alasan agar tidak terlalu membebani petani sawit.
2. Pemerintah harus membuat regulasi pelibatan petani dalam rantai supply biodiesel karena faktanya semenjak diberlakukan biodiesel belum ada dampak yang nyata bagi petani sawit padahal biodiesel ini berjalan karena ada subsidi dari pungutan sawit BPDP-Sawit yang dananya juga bersumber dari petani³.
3. Pemerintah perlu segera merevisi aturan pedoman pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit yang memberatkan petani sawit, hal ini sesuai dengan arahan presiden Jokowi pada agar prosedurnya disederhanakan⁴.
4. Pemerintah harus memperbesar Alokasi Penyaluran Dana BDPKS kepada petani dan tidak hanya pada repleting, dimana dari alokasi dana BDPKS tahun 2018 lebih banyak untuk kepentingan Biodiesel sebesar 70 % dan hanya 22 % untuk repleting sementara untuk Riset, Pengembangan SDM hanya 2 % dari dana yang sudah di kumpulkan dari pungutan.

Tentang SPKS

SPKS adalah organisasi petani kelapa sawit skala kecil yang berkomitmen untuk memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani.

SPKS didirikan pada 9 Juni 2006 dan dideklarasikan pada 2013. Organisasi ini bersama anggotanya yakni petani sawit memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani dalam berbagai sektor keuangan, kebijakan yang berpihak, dan akses pemasaran dan keberlanjutan.

² Industri Usulkan Pungutan Ekspor Sawit Diberlakukan Kembali :

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190517/257/924241/industri-usulkan-pungutan-ekspor-sawit-diberlakukan-kembali>

³ Rapor Merah dari Petani Kecil, BPDP Sawit Perlu Bebenah : <https://www.mongabay.co.id/2017/06/26/rapor-merah-dari-petani-kecil-bpdp-sawit-perlu-bebenah/>

⁴ <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-indonesian-palm-oil-conference-ipoc-2018-and-2019-price-outlook-29-oktober-2018-di-sofitel-hotel-nusa-dua-bali/>

Saat ini, SPKS sudah berada di lima Provinsi dan delapan Kabupaten. Delapan kabupaten tersebut di antaranya Labuhan Batu Utara (Sumut), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Rokan Hulu (Riau), Kuantan Singingi (Riau), Sanggau (Kalbar) Sekadau (Kalbar), Sintang (Kalbar) dan Paser (Kaltim). Anggota SPKS sebanyak 48 ribu petani kecil dengan skala lahan kurang dari 25 hektar dan bekerja langsung dikebun.

Selain di lima provinsi dan delapan kabupaten, SPKS juga melakukan berbagai program kerja, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi untuk menunjang kemampuan dan kapasitas petani sawit swadaya maupun plasma di beberapa wilayah Kabupaten lainnya seperti di Provinsi Riau, Jambi, Sumatra selatan yang belum memiliki basis SPKS daerah.

Kontak Media Manager Keanggotan dan Organisasi SPKS :
Sabarudin

Sekretariat Nasional SPKS
Sekretariat Nasional SPKS Perumahan Bogor Baru Blok A5 No.17,
Kota Bogor - Jawa Barat
Tel: 0251-8571263
Email:info.spksnasional@gmail.com
Website: www.spks.or.id